

PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH

Arta Wida Anastasia Purba¹, Nisa Teresia Four Nigerls Situmeang², Dini Fitriani³,
Khoirani Febry⁴, Fatimah Sihombing⁶, Yunita Rahma Siregar⁶

Universitas Negeri Medan¹⁻⁶

Email: artapurba.24@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Problematika Pembiayaan Pendidikan di Sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Untuk dapat tercapai tujuan pendidikan yang optimal, maka salah satunya hal paling penting adalah mengelola biaya dengan baik sesuai dengan kebutuhan dana yang diperlukan. Administrasi pembiayaan minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyaluran anggaran perlu dilakukan secara strategis dan intergratif antara stakeholder agar mewujudkan kondisi ini, perlu dibangun rasa saling percaya, baik internal pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri dapat ditumbuhkan. Keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi kata-kata kunci untuk mewujudkan efektifitas pembiayaan pendidikan.

Kata Kunci : Problematika, Pembiayaan Pendidikan, Sekolah.

ABSTRACT: This research aims to determine the problems of financing education in schools. The research method used is a qualitative method. In order to achieve optimal educational goals, one of the most important things is to manage costs well in accordance with the required funds. Minimum financing administration includes planning, implementation and supervision. Budget distribution needs to be carried out strategically and integratively between stakeholders in order to realize this condition. A sense of mutual trust needs to be built, both internally to the government and between the government and the community and the community and the community itself. Openness, participation, accountability in the implementation of education starting from planning, implementation and supervision are key words for realizing the effectiveness of education financing.

Keyword: Problems, Education Financing, Schools.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang bagi setiap negara, maju tidaknya sebuah negara di masa yang akan datang dapat di ukur dari seberapa baiknya pendidikan yang sedang berlangsung di negara tersebut, maka dapat dikatakan bahwasannya pendidikan merupakan salah satu alat untuk mencapai cita-cita bagi sebuah negara.¹ begitu juga bagi negara Indonesia yang cita-citanya telah terpampang jelas pada dasar negaranya yaitu menjadi negara yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, berdemokrasi, dan berkeadilan

¹ Ahmad Tarmizi Hasibuan dkk., "Telaah Kurikulum Dari Masa Ke Masa: Studi Evaluasi," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, no. 3 (2023): hal. 316.

sosial, dalam memperjuangkan cita-cita negara Indonesia tersebut jelas membutuhkan segenap komponen bangsa yang mampu mengemban amanat kelima dasar negara tersebut, dan salah satu jalan yang dapat di tempuh negara untuk melahirkan generasi yang dapat di andalkan adalah dengan cara memberikan mereka semua pendidikan yang terbaik dan terjangkau bagi seluruh elemen masyarakat.²

Dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia senantiasa terjadi perubahan, perubahan tersebut terjadi baik pada bidang manajerial maupun administrasinya, reformasi administrasi dan manajemen ini memiliki tujuan untuk menyempurnakan sistem dari kedua komponen di atas, sehingga performa dari setiap individu, kelompok dan institusi dapat meningkat.³ aktualisasi reformasi administrasi dan manajemen dalam pendidikan dapat berupa pembuatan perubahan inovatif pada kebijakan dan program yang di rencanakan, peningkatan efektivitas pengadministrasian, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berujung pada peningkatan kinerja, dan melakukan antisipasi terhadap tantangan tantangan yang mungkin terjadi baik dari dalam ataupun dari luar institusi.⁴

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan pada setiap daerah ini juga mencakup kewenangan dalam mengatur pembiayaan pendidikan, pembiayaan pendidikan merupakan sebuah aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima, dan bagaimana pemanfaatan dana tersebut untuk membiayai segala keperluan dalam pelaksanaan program-program pendidikan (pageluaran), sumber pembiayaan pendidikan yang di terima oleh setiap lembaga pendidikan adalah dari Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD), juga dari iuran masyarakat atau orang tua.⁵

² Hernawan, Dadang Anshari Syihabudin, dan Yeti Mulyati, "Exploring the Profile of Scientific Article Writing Ability Among Tertiary Students : Insights From Five Institutions in Indonesia," *International Journal of Education* 16, no. 2 (2022): 161–70.

³ Ahmad Tarmizi Hasibuan dkk., "Professionalisme Guru MI di Era Kebebasan (Merdeka Belajar)," *MUDABBIR Journal Reserch and Education Studies* 3, no. 1 (2023): hal. 54-56.

⁴ Bachtiar Bachtiar, "Professional Teaching and Learning Effectiveness: A Case of English Language Teaching in Indonesia," *International Journal of Education* 14, no. 1 (2021): 11–18, <https://doi.org/10.17509/ije.v14i1.25533>.

⁵ Kaila Mei Muñoz dkk., "International Journal of Education PSYCHOLOGICAL DISTRESS AND ACADEMIC SELF-EFFICACY OF COLLEGE STUDENTS : THE MODERATING ROLE OF ANXIETY AMIDST THE COVID-19 PANDEMIC" 16, no. 1 (2023): 55–66.

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan

Pendidikan Pembiayaan pendidikan merupakan komponen terpenting dalam pelaksanaan program pendidikan, segala sumber pendapatan pembiayaan pendidikan perlu di hitung dan dikelola dengan baik demi keberlangsungan program pendidikan pada masing-masing lembaga/sekolah, dengan adanya otonomi daerah dan otonomi pendidikan yang menjadikan pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab setiap daerah, tanggung jawab ini meliputi seluruh sektor pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat menengah, SD hingga SMA, pemerintah daerah berhak mengurus hampir seluruh komponen pendidikan di daerahnya masing-masing Kecuali kurikulum yang menjadi wewenang pemerintah pusat.⁶

B. Pengertian Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen pendidikan merupakan suatu cabang ilmu yang usianya relative masih muda sehingga tidak aneh apabila banyak yang belum mengenalnya. Istilah lama yang sering digunakan adalah administras.⁷ Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Banyak definisi yang telah diberikan oleh para ahli terhadap istilah manajemen ini.⁸ Namun dari sekian banyak definisi tersebut ada satu yang kiranya dapat dijadikan pegangan dalam memahami manajemen tersebut, yaitu: manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/ pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁹

Lebih lanjut menurut Mulyani A. Nurhadi (dalam blog Laili Nurh 2012) manajemen merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk manusia. Rangkaian kegiatan itu merupakan suatu proses pengelolaan dari suatu rangkaian kegiatan pendidikan yang sifatnya kompleks dan unik yang berbeda dengan tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

⁶ Adi Irma Suryadi, "Academic and Non-Academic Language Socialization for International Students At an Indonesian Public University," *International Journal of Education* 16, no. 1 (2023): 23–34.

⁷ Rc Yhobel V Magtubo dkk., "International Journal of Education MEDIATION OF STUDENT INTRINSIC MOTIVATION BETWEEN ONLINE LEARNING ENVIRONMENT AND STUDENT ENGAGEMENT" 15, no. 2 (2022): 119–28.

⁸ Wandhansari Sekar Jatiningrum dkk., "the Ahp Approach for Determining E-Learning Platform in University," *International Journal of Education* 15, no. 2 (2022): 103–12.

⁹ Liping Li, Wenqin Shen, dan Ailei Xie, "International Journal of Education Development" 15, no. 2 (2021): 69–78.

Tujuan pendidikan ini tidak terlepas dari pendidikan secara umum dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh suatu bangsa.¹⁰ Proses pengelolaan itu dilakukan oleh sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi sehingga kegiatannya harus dijaga agar tercipta kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan unsur-unsur manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan ini. Proses itu dilakukan dalam rangka mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dalam hal ini meliputi tujuan yang bersifat umum dan yang diemban oleh tiap-tiap organisasi pendidikan (skala tujuan khusus). Proses pengelolaan itu dilakukan agar tujuannya dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Manajemen menurut Udaya (dalam blog Laili Nurh 2012) memberikan rumusan bahwa manajemen yaitu “Proses untuk mencapai tujuan – tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (*planning*), mengorganisasi (*organizing*), memimpin (*leading*), dan mengendalikan (*controlling*). Dengan demikian, manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan”. Manajemen pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan formal.¹¹

Tujuan kegiatan manajemen pendidikan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional kependidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pembiayaan adalah kemampuan interval sistem pendidikan untuk mengelola dana-dana pendidikan secara efisien.¹² Pembiayaan pendidikan adalah sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya (input) yang digunakan untuk suatu kegiatan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa sumber, tetapi juga menggunakan dana secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan itu semakin kurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya dan lebih banyak yang dicapai dengan anggaran yang tersedia.¹³ Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan

¹⁰ Imelda Mallipa dan Riana Murianty, “Self-Regulated Learning Development: Students’ Perception to Explicit Instructional Support in Online Learning,” *International Journal of Education* 14, no. 2 (2022): 85–94, <https://doi.org/10.17509/ije.v14i2.43879>.

¹¹ Yati Suwartini dkk., “Writing Ability with Metaphorming Approach: A Systematic Review,” *International Journal of Education* 14, no. 2 (2022): 149–58, <https://doi.org/10.17509/ije.v14i2.43885>.

¹² Sattivany Veerabudren, Alta Kritzinger, dan Savila T. Ramasawmy, “Teachers’ perspectives on learners with reading and writing difficulties in mainstream government primary schools in mauritius,” *South African Journal of Childhood Education* 11, no. 1 (2021): 127–37, <https://doi.org/10.4102/sajce.v11i1.1023>.

¹³ Ifan Anom Bintoro Aji dan Pratiwi Pujiastuti, “Development of natural science supplement books based on local wisdom in integrative thematic learning in the elementary schools,” *Jurnal Prima Edukasia* 10, no. 1 (2022): 82–95, <https://doi.org/10.21831/jpe.v10i1.40173>.

penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu: penyusunan anggaran, pembiayaan, pemeriksaan.

C. Konsep Dasar Biaya Pendidikan

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan tidak langsung (*indirect cost*), biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan-kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.¹⁴

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur.¹⁵ Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi diantara sekolah yang satu dan daerah yang lainnya. Serta dari waktu ke waktu.

Berdasarkan pendekatan unsur biaya pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu:

1. Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran
2. Pengeluaran untuk tata usaha sekolah
3. Pemeliharaan sarana-prasarana sekolah
4. Kesejahteraan pegawai
5. Administrasi
6. Pembinaan teknis edukatif
7. Pendataan.

¹⁴ Elnida Saldaria, Vina Anggia Nastitie Ariawan, dan Isah Cahyani, "Speaking skill of elementary students reviewed by gender," *Jurnal Prima Edukasia* 7, no. 1 (2019): 20–27, <https://doi.org/10.21831/jpe.v7i1.20363>.

¹⁵ Slamet Lestari dan Nazula Nur Azizah, "The Implementation of Social Emotional Learning Approach in Elementary School," *Jurnal Prima Edukasia* 11, no. 2 (2023): 266–75, <https://doi.org/10.21831/jpe.v11i2.62179>.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam UUD 1945 pasal 31 “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.” Hal ini membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang selayaknya, dikarenakan berbagai faktor termasuk mahal biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukkannya klausul tentang pendidikan dalam amandemen UUD 1945.¹⁶

Konstitusi mengamanatkan kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan pendidikan. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa ada alokasi dana yang secara pasti digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya pemerintah belum punya kapasitas finansial yang memadai, sehingga alokasi dana tersebut dicicil dengan komitmen peningkatan alokasi tiap tahunnya.

Peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manfaat berupa peningkatan kualitas SDM. Disisi lain, prioritas alokasi pembiayaan pendidikan seyogianya diorientasikan untuk mengatasi permasalahan dalam hal aksesibilitas dan daya tampung. Karena itu, dalam mengukur efektifitas pembiayaan pendidikan, terdapat sejumlah prasyarat yang perlu dipenuhi agar alokasi anggaran yang tersedia dapat terarah penggunaannya.¹⁷

Menurut Adam Smith, Human Capital yang berupa kemampuan dan kecakapan yang diperoleh melalui Pendidikan, belajar sendiri, belajar sambil bekerja memerlukan biaya yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Perolehan ketrampilan dan kemampuan akan menghasilkan tingkat balik Rate of Return yang sangat tinggi terhadap penghasilan seseorang. Berdasarkan pendekatan Human Kapital ada hubungan Lenier antara Investment Pendidikan dengan Higher Productivity dan Higher Earning.¹⁸

Manusia sebagai modal dasar yang di Infestasikan akan menghasilkan manusia terdidik yang produktif dan meningkatnya penghasilan sebagai akibat dari kualitas kerja yang ditampilkan oleh manusia terdidik tersebut, dengan demikian manusia yang memperoleh

¹⁶ Shely Cathrin dkk., “The Problem of Affordable Education in Indonesia: The Emergence of Online Tutoring Service in Primary Education Level,” *Jurnal Prima Edukasia* 11, no. 2 (2023): 215–24, <https://doi.org/10.21831/jpe.v11i2.59830>.

¹⁷ Dwi Hariyanta, Hermanto Hermanto, dan Herwin Herwin, “Distance Learning Management in Elementary Schools During the Pandemic,” *Jurnal Prima Edukasia* 10, no. 2 (2022): 123–29, <https://doi.org/10.21831/jpe.v10i2.47712>.

¹⁸ Lian Gafar Otaya, Badrun Kartowagiran, dan Heri Retnawati, “The construct validity and reliability of the lesson plan assessment instrument in primary schools,” *Jurnal Prima Edukasia* 8, no. 2 (2020): 126–34, <https://doi.org/10.21831/jpe.v8i2.33275>.

penghasilan lebih besar dia akan membayar pajak dalam jumlah yang besar dengan demikian dengan sendirinya dapat meningkatkan pendapatan negara.

Peningkatan ketrampilan yang dapat menghasilkan tenaga kerja yang Produktivitasnya tinggi dapat dilakukan melalui Pendidikan yang dalam pembiayaannya menggunakan efisiensi Internal dan Eksternal. Dalam upaya mengembangkan suatu sistem pendidikan nasional yang berporos pada pemerataan, relevansi, mutu, efisiensi, dan efektivitas dikaitkan dengan tujuan dan cita-cita pendidikan kita, namun dalam kenyataannya perlu direnungkan, dikaji, dibahas, baik dari segi pemikiria teoritis maupun pengamatan empirik.

D. Komponen Biaya

Pendidikan Konsep biaya pendidikan sifatnya lebih kompleks dari keuntungan, karena komponen biaya terdiri dari lembaga jenis dan sifatnya. Biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang dan rupiah, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan (*opportunity cost*). Biaya kesempatan ini sering disebut "*income forgon*" yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau mengikuti *study*.¹⁹ Sebagai contoh, seorang lulusan SMP yang tidak diterima untuk melanjutkan pendidikan SMU, jika ia bekerja tentu memperoleh penghasilan dan jika ia melanjutkan besarnya pendapatan (upah, gaji) selama tiga tahun belajar di SMU harus diperhitungkan. Oleh karena itu, biaya pendidikan akan terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung atau biaya kesempatan.²⁰

Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karakteristik keuangan sekolah. Analisis efisiensi keuangan sekolah dalam pemanfaatan sumber-sumber keuangan sekolah dan hasil (*output*) sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisa biaya satuan (*unit cost*) per siswa. Biaya satuan persiswa adalah biaya rata-rata persiswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya biaya satuan persiswa menurut jenjang dan jenis pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Di dalam menentukan biaya satuan terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran

¹⁹ Herson Anwar, Lukman Arsyad, dan Arten H Mobonggi, "The management of culture and environment of madrasah: Its implementation and challenges in industrial revolution era 4.0," *Jurnal Prima Edukasia* 8, no. 2 (2020): 188–98, <https://doi.org/10.21831/jpe.v8i2.33488>.

²⁰ Muhammad Nur Wangid dan Isti Yuni Purwanti, "Implementation of group activity to solve academic Burnout elementary school students," *Jurnal Prima Edukasia* 8, no. 2 (2020): 135–44, <https://doi.org/10.21831/jpe.v8i2.33267>.

pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran perkomponen pendidikan yang digunakan oleh murid.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.

HASIL PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Biaya Pendidikan dan Sumber Dana Pembiayaan Pendidikan

A. Faktor - faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan

Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dan pembiayaan pendidikan sekolah hal ini dipengaruhi oleh:

1. Kenaikan harga (*rising prices*)
2. Perubahan relatif dalam gaji guru (*teacher's salaries*)
3. Perubahann dalam populasi dan kenaikannya prosentasi anak disekolah negeri
4. Meningkatnya standard pendidikan (*educational standards*)
5. Meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah
6. Meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi (*higher education*).

B. Sumber dana pembiayaan pendidikan

Sumber dana pembiayaan pendidikan Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan melalui undang-undang berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989. Pada bab VIII pasal 33-36 dijelaskan mengenai sumber daya pendidikan. Sumber pembiayaan pendidikan terdiri dari beberapa bagian :

1. APBN dan APBD merupakan biaya langsung yang terkait dengan penggajian guru, administrator, staf sekolah, pembelian peralatan, materi pelajaran dan gedung sekolah. Dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBD. Dana APBD berasal dari APBD Provinsi dan APBD

Kabupaten/Kota. Dana tersebut tergantung pada kemampuan keuangan pemerintah setempat dan daerah lain. Dana pendidikan yang berasal dari APBD diperuntukkan sama dengan dana yang berasal dari APBN, yakni bisa untuk pendanaan rutin dan untuk pendanaan pembangunan, tergantung pada kebutuhan sekolah. Untuk pendanaan rutin contohnya membayar gaji guru bantu/tenaga honorer. Untuk pendanaan pembangunan direalisasikan untuk rehabilitasi gedung, sarana olahraga dan sejenisnya.²¹ Dana APBN pun dapat digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang setiap daerah mendapatkan jatah yang sama dan dana APBD digunakan untuk Bantuan Operasional Pembangunan (BOP). Sedangkan dana rutin, yaitu dana yang dipakai membiayai kegiatan rutin seperti tambahan gaji guru, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, biaya pemeliharaan, dsb.

2. Dana Penunjang Pendidikan berupa beasiswa yang diterima oleh peserta didik untuk menunjang biaya pendidikannya.
3. Dana dari Masyarakat yang berupa bantuan/sumbangan BP3 (sekarang menjadi SPP) yaitu dana untuk peserta didik seperti untuk pembayaran seragam, buku, ATK, transport. Selain sumbangan SPP juga ada dana pembangunan, ialah dana yang dipakai membiayai pembangunan dalam berbagai bidang seperti sarana prasarana, alat belajar, media, dsb.
4. Sumbangan dari Pemerintah Daerah setempat ialah sumbangan yang diterima oleh sekolah dari pemerintah daerah setempat dimana sekolah tersebut berada.
5. Bantuan lain-lain adalah bantuan yang diterima oleh sekolah dari berbagai pihak selain APBN dan APBD, Dana Penunjang Pendidikan, Dana dari Masyarakat, Sumbangan dari Pemerintah Daerah setempat. Bantuan tersebut berasal dari kerjasama sekolah dengan instansi lain atau yang sejenis. Diantaranya ialah bantuan yang berasal dari luar negeri.

C. Kondisi Pendidikan Indonesia

Saat Ini Kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan

²¹ Renny Oktafia, "Poverty Alleviation: An Economic Practice Study of Islam in Culture" 98, no. Icpsuas 2017 (2018): 345-48, <https://doi.org/10.2991/icpsuas-17.2018.74>.

penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun.

Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999). Apa makna data tentang rendahnya kualitas pendidikan Indonesia itu? Maknanya adalah, jelas ada masalah dalam sistem pendidikan Indonesia. Ditinjau secara perspektif ideologis (prinsip) dan perspektif teknis (praktis), berbagai masalah itu dapat dikategorikan dalam dua masalah, yaitu :

1. Masalah mendasar, yaitu kekeliruan paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan penyelenggaraan sistem pendidikan.
2. Masalah-masalah cabang, yaitu berbagai problem yang berkaitan aspek praktis/teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, seperti mahalny biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya sarana fisik, rendahnya kesejahteraan guru, dan sebagainya.

Mahalny pendidikan masih menjadi perbincangan dan permasalahan masyarakat setiap kali pergantian tahun ajaran, bukan hanya terjadi pada sekolah swasta tetapi juga sekolah yang berstatus negeri.²²Orang tua siswa harus berfikir kembali untuk melanjutkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi akibat semakin tingginya biaya pendidikan. Sehingga muncul kata dalam salah satu buku Eko Prasetyo kalau “orang miskin dilarang sekolah”.

Padahal pendidikan adalah suatu bentuk hak asasi yang harus dipenuhi dari lembaga atau institusi yang berkewajiban memenuhinya secara merata, sehingga semua masyarakat dalam suatu bangsa tersebut dapat menikmatinya. Bukannya hanya ditujukan untuk orang yang mampu membayarnya. Mengingat pentingnya pendidikan untuk semua warga, sehingga posisinya sebagai salah satu bidang yang mendapat perhatian serius dalam konstitusi Negara kita, dan menjadi salah satu tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Negara dalam hal ini pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan secara murah dan bahkan gratis untuk masyarakatnya.

D. Penyebab Mahalnya Biaya

Pendidikan Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalny biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku

²² Medical Faculty, “The average number in Table 1 and Table 2 contribute the data expression of FAK and BALP in exercise training . They were higher than the control group . $I n \alpha 0 , 01$. The Pearson correlation test showed that a positive correlation between the increasing expression FAK and BALP as the marker of bone density .” 98, no. Icpsuas 2017 (2018): 349–51.

pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.

Makin mahal biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas.²³

Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, "sesuai keputusan Komite Sekolah". Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.

E. Dampak Mahalnya Pendidikan

Secara umum, dampak dari mahal biaya pendidikan adalah:

1. Lemahnya Sumber Daya Manusia Salah satu sektor strategis dalam usaha pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia adalah sektor pendidikan. Sektor pendidikan ini memberikan peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas dan standar SDM di Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih baik kedepannya.
2. Lemahnya Taraf Ekonomi Masyarakat Pendidikan memiliki daya dukung yang representatif atas pertumbuhan ekonomi. Salah seorang pakar pendidikan mengungkapkan bahwa pendidikan dapat meningkatkan produktivitas kerja seseorang, yang kemudian akan meningkatkan pendapatannya. Peningkatan pendapatan ini berpengaruh pula kepada pendapatan nasional negara yang bersangkutan, untuk kemudian akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah.

²³ Renny Oktafia dan Budi Haryanto, "Pengelolaan Keuangan Unit Usaha: Strategi Pengembangan Kapasitas Pondok Pesantren," *al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 2, no. 2 (2018): 141, <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n2.p141-151>.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin sadar akan pentingnya kesehatan. Pada jenjang pendidikan tinggi, peran pendidikan sangat sentral dalam menghasilkan output-output yang akan berkontribusi untuk mentransformasikan pengetahuan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.

F. Konsep Efisiensi Pendidikan

Istilah efisiensi menggambarkan hubungan antara pemasukan dan pengeluaran. Suatu system yang efisien ditunjukkan oleh keluaran yang lebih untuk sumber masukan (resources input). Efisiensi pendidikan artinya memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Untuk mengetahui efisiensi biaya pendidikan biasanya digunakan metode analisis keefektifan biaya (cost effectiveness method) yang memperhitungkan besarnya kontribusi setiap masukan pendidikan terhadap efektivitas pencapaian tujuan pendidikan atau prestasi belajar. Upaya efisiensi dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu:

1. Efisiensi Internal Suatu sistem pendidikan dinilai memiliki efisiensi internal jika dapat menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya minimum. Dapat pula dinyatakan bahwa dengan input yang tertentu dapat memaksimalkan output yang diharapkan²⁴. Efisiensi internal sangat bergantung pada dua factor utama, yaitu factor institusional dan factor manajerial. Dalam rangka pelaksanaan efisiensi internal, perlu dilakukan penekanan biaya pendidikan melalui berbagai jenis kebijakan, antara lain:
 - a. Menurunkan biaya operasional
 - b. Memberikan biaya prioritas anggaran terhadap komponen-pomponen input yang langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar.
 - c. Meningkatkan kapasitas pemakaian ruang kelas, dan fasilitas belajar lainnya
 - d. Meningkatkan kualitas PBM
 - e. Meningkatkan motivasi kerja guru
 - f. Memperbaiki rasio guru-murid.
2. Efisiensi Eksternal Istilah efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode cost benefit analysis, yaitu rasio antara keuntungan financial sebagai hasil pendidikan

²⁴ Wahyu Eko Pujiyanto dan Laily Muzdalifah, "Digital marketing in Islamic perspective: A literature review," *al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 6, no. 2 (2022): 247–58, <https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p247-258>.

(biasanya diukur dengan penghasilan) dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Analisis efisiensi eksternal berguna untuk menentukan kebijakan dalam pengalokasian biaya pendidikan atau distribusi anggaran kepada seluruh sub-sub sector pendidikan. Fattah (2006:43) merumuskan arahan-arahan dalam meningkatkan efisiensi pembiayaan pendidikan sebagai berikut:

- a. Pemerataan kesempatan memasuki sekolah (equality of acces)
- b. Pemerataan untuk bertahan disekolah (equality of survival).
- c. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar (equality of output)
- d. Pemerataan kesempatan menikmati manfaat pendidikan dalam kehidupan masyarakat (equality of outcome).

G. Fungsi Anggaran Pendidikan

Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Anggaran pada dasarnya terdiri dari pemasukan dan pengeluaran. Sisi penerimaan atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana.

Biasanya dalam pembahasan pembiayaan pendidikan, sumber-sumber biaya dibedakan dalam tiap golongan pemerintah, orangtua, masyarakat dan sumber-sumber lainnya. Sisi pengeluaran terdiri dari alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai. Fungsi dari anggaran itu meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Merupakan kerangka operasional dalam biaya dan waktu kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Alat untuk mendelegasikan wewenang dalam pelaksanaan suatu rencana.
3. Anggaran dapat pula sebagai instrument kegiatan control dan evaluasi penampilan.

Bila besarnya pengeluaran dibandingkan dengan jatah anggaran dan tingkat penggunaan dapat menjadi ukuran efektivitas atau efisiensi kegiatan yang dilaksanakan Pendanaan Pendidikan menurut PP NO. 48 Tahun 2008. Permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Sistem anggaran pendidikan di Indonesia masih tergolong kompleks, rumit, birokratis, kaku, dan masih terlalu banyak melibatkan instansi dengan kepentingan masing-

masing, memang dengan adanya otonomi daerah yang salah satu tujuannya adalah pemangkasan jalur birokrasi dan penyederhanaan sistem penganggaran pendidikan, namun dalam aplikasinya nyatanya masih banyak permasalahan yang terjadi, dengan pencairan anggaran lewat beberapa instansi DAU, DAK, proyek-proyek pemerintah berskala nasional, regional dan lokal nyatanya mengakibatkan banyak terjadi pengahmburan dan kebocoran anggaran serta penggunaan yang tidak efisien .

2. Perbedaan kondisi di masing-masing daerah yang menyebabkan perbedaan pula pada kemampuan masing-masing daerah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di daerahnya, daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alamnya secara otomatis akan mendapatkan suntikan anggaran pendidikan yang cukup banyak, tapi sebaliknya bagi daerah-daerah terpencil dan tidak memiliki sumber daya alam yang mencukupi untuk mendukung program otonomi ini akan semakin tertinggal dan mengakibatkan terjadinya ketimpangan kemajuan pendidikan antara daerah yang di kategorikan kaya dan daerah miskin .
3. Pelaksanaan otonomi daerah nyatanya selalu menyebabkan bertambahnya tenaga-tenaga struktural di dalamnya, sehingga terjadi peningkatan jumlah SDM, dan peningkatan jumlah SDM ini pasti akan diikuti dengan peningkatan jumlah anggaran yang harus dikeluarkan untuk operasional pendidikan dengan keterbatasan sumber dana di beberapa daerah dan kurangnya konsep efisiensi dalam penggunaannya mengakibatkan permasalahan baru yang terjadi di berbagai daerah.
4. Sistem alokasi anggaran pendidikan di setiap daerah yang berbeda-beda, tergantung dengan selera daerah masing-masing menyebabkan terjadinya ketidakmerataan, ketidakadilan, kurang efisien, kurang efektif, dan membuka pintu terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), hal ini menjadikan kondisi anggaran pendidikan di beberapa daerah semakin memburuk karena terbatasnya pula anggaran dari pemerintah pusat.
5. Terjadinya penyelewengan pada pengelolaan dan penyaluran dana ke sekolah-sekolah, penyelewengan-penyelewengan tersebut di antaranya adalah :
 - a. adanya pesanan dari pusat soal pengalokasian anggaran pendidikan di daerah, sehingga bertentangan dengan prinsip otonomi pendidikan dan berseberangan dengan kebutuhan sekolah dan masyarakat.
 - b. Pendistribusian dana yang kurang proporsional antara sekolah kaya dan sekolah miskin, juga terhadap daerah kaya dan daerah miskin.

- c. Proses penyaluran dana secara birokratis yang di rasa tidak transparan dan mengakibatkan terbukanya pintu untuk terjadinya KKN.
- d. Peran pemerintah daerah terhadap proses pembiayaan pendidikan masih sangat minim, jikalau ada masih sangat kental dengan kepentingan politik, bukan murni untuk memajukan sektor pendidikan.
- e. Lemahnya berapa sekolah dalam mengelola anggaran pendidikan di sekolahnya dan kurangnya Oran serta dukungan masyarakat di dalamnya.
- f. Keterlambatan Pencairan anggaran pendidikan yang tidak sesuai dengan kalender kegiatan pendidikan di masing-masing daerah juga masih menjadi kendala yang tidak kunjung menemukan solusi, hal ini memaksa sekolah untuk menggunakan dana yang harusnya di alokasikan pada kegiatan lain untuk menutup keterlambatan pencairan dana tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa problematika Manajemen Pembiayaan Pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu: penyusunan anggaran, pembiayaan, pemeriksaan. Serta pendidikan membutuhkan biaya, Pembiayaan terhadap pendidikan harus dibayar lebih mahal karena pendidikan adalah investasi. Peranan biaya dalam mewujudkan mutu pendidikan memberi kontribusi besar dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, perolehan keterampilan dan kemampuan yang di dapat dari pendidikan akan menghasilkan tingkat balik (Rate of Return) yang sangat tinggi terhadap penghasilan seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Ifan Anom Bintoro, dan Pratiwi Pujiastuti. "Development of natural science supplement books based on local wisdom in integrative thematic learning in the elementary schools." *Jurnal Prima Edukasia* 10, no. 1 (2022): 82–95. <https://doi.org/10.21831/jpe.v10i1.40173>.
- Anwar, Herson, Lukman Arsyad, dan Arten H Mobonggi. "The management of culture and environment of madrasah: Its implementation and challenges in industrial revolution era 4.0." *Jurnal Prima Edukasia* 8, no. 2 (2020): 188–98. <https://doi.org/10.21831/jpe.v8i2.33488>.

- Bachtiar, Bachtiar. "Professional Teaching and Learning Effectiveness: A Case of English Language Teaching in Indonesia." *International Journal of Education* 14, no. 1 (2021): 11–18. <https://doi.org/10.17509/ije.v14i1.25533>.
- Cathrin, Shely, Farida Hanum, Siti Irene Astuti Dwiningrum, Ariefa Efianingrum, Suyantiningsih Suyantiningsih, dan Masami Hayashi. "The Problem of Affordable Education in Indonesia: The Emergence of Online Tutoring Service in Primary Education Level." *Jurnal Prima Edukasia* 11, no. 2 (2023): 215–24. <https://doi.org/10.21831/jpe.v11i2.59830>.
- Faculty, Medical. "The average number in Table 1 and Table 2 contribute the data expression of FAK and BALP in exercise training . They were higher than the control group . In $\alpha 0 , 01$. The Pearson correlation test showed that a positive correlation between the increasing expression FAK and BALP as the marker of bone density ." 98, no. Icpsuas 2017 (2018): 349–51.
- Hariyanta, Dwi, Hermanto Hermanto, dan Herwin Herwin. "Distance Learning Management in Elementary Schools During the Pandemic." *Jurnal Prima Edukasia* 10, no. 2 (2022): 123–29. <https://doi.org/10.21831/jpe.v10i2.47712>.
- Hasibuan, Ahmad Tarmizi, Sapna Andani Batubara, Masitah Khairani, dan Eka Anggraini Siagian. "Telaah Kurikulum Dari Masa Ke Masa: Studi Evaluasi." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, no. 3 (2023): 313–19.
- Hasibuan, Ahmad Tarmizi, Dayang Lidya Fitriah, Azizah Febryani Nasution, dan Siti Aisyah Harahap. "Professionalisme Guru MI di Era Kebebasan (Merdeka Belajar)." *MUDABBIR Journal Reserch and Education Studies* 3, no. 1 (2023): 146–53.
- Hernawan, Dadang Anshari Syihabudin, dan Yeti Mulyati. "Exploring the Profile of Scientific Article Writing Ability Among Tertiary Students : Insights From Five Institutions in Indonesia." *International Journal of Education* 16, no. 2 (2022): 161–70.
- Jatiningrum, Wandhansari Sekar, Sri Nastiti, Andayani Sesanti, Retno Utami, Dhia Zalfa, Muhammad Syafril, dan Nur Wachid. "the Ahp Approach for Determining E-Learning Platform in University." *International Journal of Education* 15, no. 2 (2022): 103–12.
- Lestari, Slamet, dan Nazula Nur Azizah. "The Implementation of Social Emotional Learning Approach in Elementary School." *Jurnal Prima Edukasia* 11, no. 2 (2023): 266–75. <https://doi.org/10.21831/jpe.v11i2.62179>.
- Li, Liping, Wenqin Shen, dan Ailei Xie. "International Journal of Education Development" 15, no. 2 (2021): 69–78.
- Magtubo, Rc Yhobel V, Jerica Joyce Banal, Vincent Alex D Abregado, Allan Carlo S Chavez, Justin Vianey, dan Mercado Embalsado. "International Journal of Education MEDIATION OF STUDENT INTRINSIC MOTIVATION BETWEEN ONLINE LEARNING ENVIRONMENT AND STUDENT ENGAGEMENT" 15, no. 2 (2022): 119–28.
- Mallipa, Imelda, dan Riana Murianty. "Self-Regulated Learning Development: Students' Perception to Explicit Instructional Support in Online Learning." *International Journal of Education* 14, no. 2 (2022): 85–94. <https://doi.org/10.17509/ije.v14i2.43879>.

- Muñoz, Kaila Mei, Ma Arnella Lozano, Princess Diane Guintu, dan Irvin Jither. "International Journal of Education PSYCHOLOGICAL DISTRESS AND ACADEMIC SELF-EFFICACY OF COLLEGE STUDENTS : THE MODERATING ROLE OF ANXIETY AMIDST THE COVID-19 PANDEMIC" 16, no. 1 (2023): 55–66.
- Oktafia, Renny. "Poverty Alleviation: An Economic Practice Study of Islam in Culture" 98, no. Icpsuas 2017 (2018): 345–48. <https://doi.org/10.2991/icpsuas-17.2018.74>.
- Oktafia, Renny, dan Budi Haryanto. "Pengelolaan Keuangan Unit Usaha : Strategi Pengembangan Kapasitas Pondok Pesantren." *al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 2, no. 2 (2018): 141. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n2.p141-151>.
- Otaya, Lian Gafar, Badrun Kartowagiran, dan Heri Retnawati. "The construct validity and reliability of the lesson plan assessment instrument in primary schools." *Jurnal Prima Edukasia* 8, no. 2 (2020): 126–34. <https://doi.org/10.21831/jpe.v8i2.33275>.
- Pujianto, Wahyu Eko, dan Laily Muzdalifah. "Digital marketing in Islamic perspective: A literature review." *al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 6, no. 2 (2022): 247–58. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p247-258>.
- Saldaria, Elnida, Vina Anggia Nastitie Ariawan, dan Isah Cahyani. "Speaking skill of elementary students reviewed by gender." *Jurnal Prima Edukasia* 7, no. 1 (2019): 20–27. <https://doi.org/10.21831/jpe.v7i1.20363>.
- Suryadi, Adi Irma. "Academic and Non-Academic Language Socialization for International Students At an Indonesian Public University." *International Journal of Education* 16, no. 1 (2023): 23–34.
- Suwartini, Yati, Ninuk Lustyantie, Muchlas Suseno, dan Yetti Supriyati. "Writing Ability with Metaphorming Approach: A Systematic Review." *International Journal of Education* 14, no. 2 (2022): 149–58. <https://doi.org/10.17509/ije.v14i2.43885>.
- Veerabudren, Sattiavany, Alta Kritzinger, dan Savila T. Ramasawmy. "Teachers' perspectives on learners with reading and writing difficulties in mainstream government primary schools in mauritius." *South African Journal of Childhood Education* 11, no. 1 (2021): 127–37. <https://doi.org/10.4102/sajce.v11i1.1023>.
- Wangid, Muhammad Nur, dan Isti Yuni Purwanti. "Implementation of group activity to solve academic Burnout elementary school students." *Jurnal Prima Edukasia* 8, no. 2 (2020): 135–44. <https://doi.org/10.21831/jpe.v8i2.33267>.